

**PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
(Studi pada Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)**

Vallen Laurinda Defrina Widyawan, Lely Indah Mindarti, Endah Setyowati
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
E-mail: valaurinda@gmail.com

***Abstract: Development of Wood Processing Industry as a Local Economic Development Efforts (Study at Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro).** Wood processing industry center is quite commonly found in Bojonegoro, one of the place is located in Sukorejo Village. It is stated in the "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" (RPJMD) 2013-2018 Bojonegoro, related to the development of potential industrial sectors, one of them is the wood processing industry. This study aims to describe and identify Development of Wood Processing Industry as a Local Economic Development Efforts in Sukorejo Village. This type of research is descriptive with qualitative approach belongs to Miles, Hubberman and Saldana. The result of the development has been successful. But the work program is still needed in order to training and coaching the craftsmen. And also, it takes more intensive communication to the craftsmen from the stakeholder.*

***Keywords:** local economic development, timber processing industry*

Abstrak: Pengembangan Industri Pengolahan Kayu sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro). Sentra industri pengolahan kayu sudah cukup menjamur di Kabupaten Bojonegoro yang salah satunya terletak di Desa Sukorejo. Hal ini tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 terkait dilakukannya pengembangan sektor-sektor industri potensial yang salah satunya adalah industri pengolahan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pengembangan industri pengolahan kayu di Desa Sukorejo sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bersifat interaktif milik Miles, Hubberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan telah cukup berhasil. Namun, masih perlu program kerja yang jelas untuk melatih pengrajin dan perlu dilakukan komunikasi lebih intensif pada pengrajin yang harus dilakukan pemerintah.

Kata kunci: pengembangan ekonomi lokal, industri pengolahan kayu

Pendahuluan

Seiring dengan adanya peraturan tentang otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. Salah satu upayanya adalah dengan menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal atau PEL yang merupakan sebuah langkah dan usaha pemanfaatan sumberdaya dan dana serta peran aktor-aktor terkait dalam kaitannya mencapai sasaran utama yaitu peningkatan kesejahteraan.

Salah satu pengembangan ekonomi lokal adalah dengan memanfaatkan potensi alam sebagai bahan baku menjadi barang jadi lewat industri. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang mampu memimpin sektor lain dalam perekonomian menuju kemajuan (Dumairy, 1996, h.227). Kawasan Sentra Produksi merupakan salah satu program Pengembangan Ekonomi Lokal yang bertujuan untuk mengembangkan produksi berbasis kelompok komoditas unggulan tertentu pada suatu wilayah melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta (Supriyadi, 2007, h.113).

Salah satu daerah yang memanfaatkan potensi alam ini adalah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu potensi daerah adalah kayu yang merupakan potensi unggulan dari Kabupaten Bojonegoro. Potensi ini telah dimanfaatkan oleh

masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan baku, utama industri mebel. Hal ini dikarenakan hutan produksi merupakan areal yang paling luas keberadaannya di Bojonegoro yakni sebesar 93.833,36 Ha (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2010).

Tersohornya sentra menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian mereka. Akan tetapi, pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah masih belum begitu baik. Hal ini dikarenakan pengrajin masih mengambil kayu tidak hanya dari daerah Bojonegoro saja, melainkan dari luar daerah pula. Padahal, stok kayu yang ada di Bojonegoro sudah bisa mencukupi kebutuhan bahan baku untuk mereka.

Jika dilihat dari kekayaan sumberdaya alam Bojonegoro berupa kayu, maka sudah seharusnya pemanfaatan kayu bisa dimaksimalkan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya guna mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Dengan adanya kayu sebagai potensi Kabupaten Bojonegoro, maka dibutuhkan peran pemerintah guna memaksimalkan potensi alam Kabupaten Bojonegoro dalam usahanya sebagai pengembangan ekonomi lokal sehingga sasaran utama dari ekonomi lokal yaitu kesejahteraan masyarakatnya bisa terwujud.

Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan dalam Administrasi Publik

Waldo (1971) dalam Pasolong (2010, h.8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Administrasi Pembangunan

Kartasasmita (1996, h.9) menyatakan jika administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan di dalam aspek kehidupan bangsa.

2. Pengembangan Industri

Pengertian Pengembangan Industri

Pengembangan industri adalah suatu usaha mengolah dan merubah bahan menjadi suatu produk yang baru agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Tujuan Pengembangan Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga negara Indonesia.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal

Buku Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten (2012, h.17-18) memaparkan bahwa konsep PEL memberi penekanan pada pemanfaatan secara maksimal terhadap sumber daya, kapasitas dan keterampilan yang ada di daerah. PEL didefinisikan sebagai suatu kerjasama yang terjalin antara pemerintah, dunia usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan juga memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki daerah guna mengoptimalkan dan menciptakan perekonomian lokal yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya.

Menurut Supriyadi (2007, h.106) menyebutkan jika PEL berusaha memanfaatkan sumber daya lokal. Sumber daya lokal yang dimaksud disini yaitu sumber daya fisik, manusia, dan juga kelebihannya. Tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada serta kerja sama yang kondusif antar segala sektor baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Akan tetapi Dalam pengembangan ekonomi lokal tidak selalu serta merta bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun. Terdapat beberapa hal yang menyulitkan kerangka kerja operasional pengembangan ekonomi lokal. Beberapa hal yang menyulitkan ini antara lain sistem perbankan, proses pengambilan keputusan, organisasi pelayanan, monitoring dan evaluasi serta dihadapkan pada kendala keahlian (Supriyadi, 2007, h.118).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus antara lain

1. Pengembangan industri pengolahan kayu sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal:
 - a. Upaya pengembangan industri pengolahan kayu di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat dari pengembangan

- 1) Sumberdaya manusia dengan cara memfasilitasi masyarakat guna meningkatkan peran sumberdaya manusia
 - 2) Sumberdaya alam yang berupa kerjasama antar daerah
 - 3) Teknologi dengan cara pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri
 - 4) Kreativitas dan inovasi yang berupa pelatihan dan pembinaan
- b. Kontribusi pengembangan industri pengolahan kayu dilihat dari
- 1) Perluasan kesempatan kerja dan usaha
 - a) Pendapatan masyarakat
 - b) Pendapatan asli daerah
 - 2) Keberdayaan lembaga produksi dan pemasaran yang berupa membentuk jaringan kerja kemitraan
 - 3) Hubungan antar aktor terkait
2. Faktor-faktor yang turut berperan dalam pengembangan industri pengolahan kayu, yaitu:
- a. Faktor Pendukung
 - 1) Potensi daerah berupa kayu
 - 2) Ketersediaan sumberdaya manusia
 - 3) Pembiayaan
 - b. Faktor Penghambat
 - 1) Sifat pasif pengrajin
 - 2) Sifat individualisme pengrajin

Pembahasan

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang terdapat di Jawa Timur. Sektor unggulan dan komoditas unggulan yang dimiliki adalah sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, sektor migas, sektor pariwisata, dan sektor industri kreatif. Salah satu sektor industri kreatif yang telah tersohor namanya di Kabupaten Bojonegoro adalah industri mebel yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

1. Pengembangan industri pengolahan kayu sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal:

a. Upaya pengembangan industri pengolahan kayu di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat dari pengembangan

1) Sumberdaya manusia dengan cara memfasilitasi masyarakat guna meningkatkan peran sumber daya manusia

Dengan adanya 57 pengrajin yang masing-masing memiliki karyawan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang ada adalah dengan cara memfasilitasi masyarakat dengan adanya

staf-staf di bidang terkait yakni IHPK (Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan) dan juga fasilitas teknologi yang dinaungi di dalam UPT (Unit Pelaksana Teknis). Untuk mendukung pelaku usaha dalam memaksimalkan produksinya, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro memasukkan Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan di dalam struktur organisasi dinas. Struktur organisasi inilah yang membantu dinas dalam melaksanakan hal-hal terkait industri yang berasal dari pertanian dan juga hasil hutan.

Penyediaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah juga menjangkit tumbuhnya tenaga kerja baru. Hal ini dikarenakan dengan adanya fasilitas yang memadai maka pengusaha kecil yang akan memulai usaha mereka di bidang industri mebel tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh fasilitas serta tidak akan ragu dalam memulai usaha. Ketersediaan staf merupakan hal yang penting dan harus ada guna menjawab kebutuhan para pengrajin. Begitu pula dengan UPT Kayu yang memiliki staf-staf yang dipekerjakan untuk membantu para pengrajin.

2) Sumberdaya alam yang berupa kerjasama antar daerah

Ketersediaan sumberdaya alam merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu industri. Lahan Bojonegoro banyak digunakan sebagai hutan produksi. Hutan produksi ini jumlahnya lebih dari 40% luas keseluruhan Kabupaten Bojonegoro itu sendiri. Ini menunjukkan jika bahan baku mentah berupa kayu yang ada di Bojonegoro jumlahnya banyak dan sanggup memenuhi kebutuhan pengusaha kayu yang memanfaatkan kayu sebagai penopang perekonomiannya. Walaupun kayu yang terdapat di Bojonegoro melimpah, namun tidak semuanya dimanfaatkan oleh pengrajin. Pengrajin juga mengambil bahan baku dari luar Bojonegoro. Sehingga memunculkan kerjasama antar daerah. Pengrajin memanfaatkan kayu yang berasal dari Cepu (Jawa Tengah), Parengan (Tuban), Ngawi, dan juga Jatirogo (Tuban).

3) Teknologi dengan cara pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri

Teknologi merupakan suatu komponen yang penting dalam menunjang terjadinya pengembangan suatu sentra. Apalagi sentra tersebut mengandalkan teknologi sebagai jantung utama kehidupan mereka dalam hal produksi. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri didukung dengan adanya alat-alat yang menjadi fasilitas produksi pengrajin. Alat-alat yang digunakan di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kayu

merupakan alat-alat yang pengadaannya disokong dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan juga dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Kehadiran teknologi merupakan kebutuhan yang penting untuk pengrajin di Desa Sukorejo. Adanya UPT kayu yang mendukung berjalannya industri ini menjawab kebutuhan pengrajin akan ketersediaan teknologi untuk membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan membuat mebel. Teknologi yang digunakan juga tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengrajin dalam hal mengolah kayu menjadi mebel.

4) Kreativitas dan inovasi yang berupa pelatihan dan pembinaan

Kreativitas dan inovasi harus dimiliki oleh para pengrajin sehingga barang yang mereka produksi dan mereka pasarkan memiliki daya saing dan keunikan tersendiri dari produk-produk yang dihasilkan pengrajin lainnya. Dengan memiliki kreativitas dan inovasi, maka para pengrajin bisa mempertahankan usahanya dengan ciri khas yang dimilikinya. Penumbuhan kreativitas dan inovasi dilakukan dengan campur tangan dari pemerintah setempat. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan dan pembinaan.

Pelatihan dan pembinaan penting adanya agar pengrajin dapat tumbuh serta kreativitas dan inovasi mereka dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Pelatihan yang diberikan berupa pemberian materi terkait desain baru serta praktek mengukir agar mereka memiliki ciri khas dari daerah lain. Sedangkan pembinaan dilakukan dari sisi manajemen yang diberikan pada pengrajin agar lebih tertata di dalam area sentra. Pembinaan dilakukan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bojonegoro sedangkan pelatihan dilakukan dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

b. Kontribusi pengembangan industri pengolahan kayu dilihat dari

1) Perluasan kesempatan kerja dan usaha

a) Pendapatan masyarakat

Dilakukannya pelatihan, pembinaan, pemberian fasilitas, dan juga penguatan modal mendukung terjadinya kesempatan masyarakat untuk berkembang dan menjadi pengrajin baru. Hal ini kemudian berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan usaha. Sedangkan dampak dari adanya perluasan kesempatan kerja dan usaha adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Kontribusi dari adanya pengembangan industri pengolahan kayu ini adalah pendapatan masyarakat yang meningkat. Hal ini dikarenakan

adanya penekanan biaya pada produksi yang dibantu oleh pemerintah dan pengrajin mendapatkan bekal dalam memproduksi mebel dari pelatihan dan juga dari modal yang disediakan pemerintah.

b) Pendapatan asli daerah

Kontribusi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, namun juga oleh pemerintah, yakni berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini didapat dari retribusi hasil pemakaian kekayaan daerah berupa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan adanya penerimaan pembayaran dari retribusi pemakaian kekayaan daerah mampu menyumbang pendapatan asli daerah. Adanya perluasan kerja dan usaha pada akhirnya dapat menyumbang pendapatan asli daerah lewat retribusi yang dibayarkan.

2) Keberdayaan lembaga produksi dan pemasaran yang berupa membentuk jaringan kerja kemitraan

Keberdayaan lembaga ini penting adanya untuk mengembangkan sektor usaha potensial agar lebih maju lagi. Hal ini penting untuk mendukung hasil produk yang lebih baik dan mengoptimalkan pengenalan produk ke khalayak luas. Adanya lembaga produksi mampu membentuk hubungan dan jaringan yang terjalin antar pelaku ekonomi yakni masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Salah satunya kontribusi dari adanya lembaga produksi dan pemasaran yang dibentuk diantara pengrajin adalah membentuk jaringan kerja kemitraan antara pelaku ekonomi untuk pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan kapasitas pasar pada tingkat lokal, regional, dan global. Dengan adanya hubungan yang baik antara konsumen dan pelaku usaha di bidang yang sama, maka kerja sama antar pelaku ekonomi ini telah terjalin.

3) Hubungan antar-aktor terkait

Pengembangan industri pengolahan mebel di Sukorejo ini dimonopoli oleh pemerintah semata. Ditunjukkan dengan adanya pembangunan UPT kayu yang di dalamnya tanpa ada campur tangan pihak swasta. Hal ini karena berangkat dari adanya kebutuhan dari pihak pengrajin yang membutuhkan alat operasional sebagai sarana yang membantu mereka dalam hal pengolahan kayu

Keterkaitan dinas satu dengan dinas yang lain juga terjadi di dalam pengembangan sentra ini. Yakni dari permodalan juga dari pemasaran. Akan tetapi peran yang ditunjukkan tidak sebesar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memegang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dengan masyarakat sebagai aktor utama sasaran kegiatan dan pemerintah sebagai aktor penunjang kegiatan. Maka hubungan yang tercipta pun aling berkaitan antar aktor terkait. Dalam menjalankan pengembangan sentra mebel ini, pemerintah lah yang memonopoli intervensi ini. Hubungan yang terjalin hanya antara pemerintah dan masyarakat saja. Ini dikarenakan pemerintah sebagai fasilitator dalam menyediakan kebutuhan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang turut berperan dalam pengembangan industri pengolahan kayu, yaitu:

a. Faktor Pendukung

1) Potensi daerah berupa kayu

Adanya kayu yang menjadi bahan baku utama dari keberlangsungan sentra ini menjadikannya potensi yang mendukung berjalannya pengembangan. Hal ini ditunjukkan dengan melimpahnya sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Bojonegoroitu sendiri serta tercukupi pasokan dari daerah lain yang ditunjukkan lewat kerjasama pembelian kayu dengan daerah lain seperti dari Cepu (Jawa Tengah), Parengan (Tuban), Ngawi, dan juga Jatirogo (Tuban).

2) Ketersediaan sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia merupakan hal penting yang menjadikan dukungan sentra ini. Ini dikarenakan sumberdaya manusia merupakan penggerak dari sentra ini. Selain pengrajin terdapat pula kepanjangan tangan dari pemerintah berupa dinas yang memiliki staf dalam menjalankan pengembangan ini. Hal ini melalui memfasilitasi masyarakat dengan adanya staf-staf di bidang terkait yakni IHPK (Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan) dan juga fasilitas teknologi yang dinaungi di dalam UPT (Unit Pelaksana Teknis).

3) Pembiayaan

Pembiayaan yang jelas diberikan oleh pemerintah lewat fasilitas yakni penguatan

modal. Pelaku usaha yang telah memiliki usaha sekecil apapun akan dibantu oleh pemerintah lewat bantuan modal. Modal ini didapat dari APBN dan juga APBD. Sehingga berdampak pada bertambahnya pelaku usaha.

b. Faktor Penghambat

1) Sifat pasif pengrajin

Pengrajin telah mampu menjual proskunya sendiri sehingga membuat mereka pasif dan sulit menerima motivasi untuk menghasilkan produk yang lebih berorientasi pasar dan berdaya saing tinggi.

2) Sifat individualisme pengrajin

Sifat individualisme yang dimiliki pengrajin membuat pengrajin merasa paling mampu dalam hal produksi mebel. Dengan adanya sifat ini walaupun hubungan yang terjalin antar pengrajin sudah baik, namun hubungan mereka tidak terlalu erat.

Kesimpulan

Pengembangan industri pengolahan kayu di Desa Sukorejo ini dapat berjalan dengan adanya pengrajin, staf dari IHPK, dan UPT Kayu. Kemudian dari segi sumberdaya alam dan teknologi juga telah memadai. Serta terdapat peran pemerintah melalui pelatihan dan pembinaan. Ditambah adanya bantuan permodalan dari pemerintah yang menandakan jika pengembangan ini telah sukses. Sehingga berdampak pada kontribusi pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah, terbentuknya jaringan kerja kemitraan dan hubungan antar aktor terkait.

Akan tetapi sifat pasif dan individualisme pengrajin menjadi hal yang menghambat terjalinya pengembangan ini. Hal ini disebabkan karena pengrajin merasa telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas.

Saran

Dibutuhkan adanya komunikasi antara pemerintah dan pengrajin agar hubungan yang terjalin bisa lebih guyup. Selain itu diperlukan juga program kerja yang jelas untuk pengembangan ini. Serta perlu adanya program reboisasi karena pengembangan ini bergantung pada alam.

Daftar Pustaka

Dumairi. (1996) **Perekonomian Indonesia**. Jakarta, Erlangga.
Pasolong, Harbani, (2013) **Teori Administrasi Publik**. Bandung, Alfabeta.

- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2012) **Buku Profil Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro.** Bojonegoro.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2013) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.** Bojonegoro.
- Rahma, Hania. (2012) **Buku Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten.** Jakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Republik Indonesia. (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004. Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Jakarta, Sekretariat Negara.
- Supriyadi, Edy. (2007) **Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal : Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL.** Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 18 (2): 103-123.